



Daftar Isi Tersedia di Inovasi Analisis Data

# Jurnal Inovasi Pajak Indonesia

Halaman Utama Jurnal <https://analysisdata.co.id>



## Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional dengan Moderasi Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak

Wulan Setyaningsih<sup>1</sup>, Tiara Dwi Syamsiah<sup>2</sup>,

Departemen Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Data Naskah;**

Diterima 11 Mei 2024  
 Revisi Artikel 10 Juni 2024  
 Publikasi 10 Juli 2024

**Korespondensi;**

Wulan Setyaningsih

**Kata kunci:**

Penghindaran Pajak, Komisaris Independen, Audit Eksternal, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Rasio Cakupan Audit Pajak, Regresi Moderasi.

### ABSTRAK



**Tujuan Utama:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh berbagai mekanisme pengawasan perusahaan termasuk persentase komisaris independen, komite audit, audit eksternal, dan kepemilikan institusional saham terhadap penghindaran pajak, serta peran rasio cakupan audit pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.

**Metode:** Data sekunder dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di bursa saham, dan analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dan regresi moderasi. Metode ini memungkinkan penilaian mendalam tentang pengaruh langsung dan interaksi variabel-variabel tersebut terhadap penghindaran pajak.

**Implikasi Teori dan Kebijakan:** Temuan penelitian ini memperluas teori pengawasan *agency theory* dengan menyoroti peran penting pengawasan dalam mengurangi penghindaran pajak. Secara kebijakan, hasil penelitian ini menyarankan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap komisaris independen dan audit eksternal serta peningkatan transparansi dalam audit pajak untuk mengurangi penghindaran pajak.

**Kebaruan Penelitian:** Penelitian ini menawarkan wawasan baru dengan mengintegrasikan rasio cakupan audit pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara variabel pengawasan dan penghindaran pajak, yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya dalam literatur.

**Implikasi Praktis:** Penguatan peran komisaris independen, audit eksternal, dan cakupan audit pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

### ARTICLE INFO

**Manuscript Data;**

Received May 11, 2024  
 Article Revision June 10, 2024  
 Publication July 10, 2024

### ABSTRACT

**Main Objective:** This study aims to explore the effect of various corporate oversight mechanisms including the percentage of independent commissioners, audit committee, external audit, and institutional ownership of shares on tax avoidance, as well as the role of tax audit coverage ratio as a moderating variable in the relationship.

**Methods:** Secondary data was collected from annual reports of listed companies, and analysis was conducted using multiple linear regression as well as moderation regression. This method allows an in-depth assessment of the direct and interaction effects of these variables on tax avoidance.

**Theory and Policy Implications:** The findings of this study extend the supervisory agency theory by highlighting the important role of supervision in reducing tax avoidance. Policy-wise, the results suggest the need for stricter regulation of

Korespondensi; W100240001@student.ums.ac.id



Jurnal Inovasi Pajak Indonesia (JIPI) © 2024 oleh Inovasi Analisis Data dilisensikan di bawah lisensi CC BY-SA 4.0

independent commissioners and external audit as well as increased transparency in tax audits to reduce tax avoidance.

**Research Novelty:** This study offers new insights by integrating tax audit coverage ratio as a moderating variable in the relationship between supervisory variables and tax avoidance, which has not been widely explored previously in the literature.

**Practical Implications:** Strengthening the role of independent commissioners, external audit, and tax audit coverage is necessary to improve corporate tax compliance and reduce tax avoidance practices.

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

## 1. Pendahuluan

Belakangan ini, perilaku pajak perusahaan telah menjadi perhatian utama bagi perusahaan multinasional dan pemerintah. Ketika perusahaan global secara agresif memanfaatkan strategi pajak yang rumit untuk meminimalkan kewajiban, negara-negara khawatir basis pajak mereka terancam (Elbra dan Mikler 2017). Indonesia mengambil tindakan dengan meningkatkan tingkat pemeriksaan dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Dari tahun 2014 hingga 2017 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk memperkuat audit dan mendorong kepatuhan terhadap tanggung jawab (Ng dan Kurniawan 2022). Penelitian menegaskan adanya korelasi positif: pengawasan yang lebih ketat mencegah penghindaran dengan meningkatkan risiko deteksi dan hukuman atas ketidaksesuaian (Kuo dan Lee 2016). Namun, apakah tata kelola yang kuat dapat mengimbangi penghindaran bahkan di tengah audit yang semakin intensif masih belum dapat dipastikan (Minnis dan Shroff 2017). Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara membengkaknya kuota audit dan administrasi perusahaan, serta bagaimana faktor-faktor ini berdampak pada ketidakjujuran di perusahaan multinasional Indonesia (Fox et al. 2018). Penelitian ini berusaha untuk menentukan apakah struktur kepemimpinan dapat menangkal tekanan penghindaran yang berasal dari pemeriksaan yang lebih dekat.

Penghindaran pajak terus menjadi perhatian penting baik di negara industri maupun negara berkembang, karena bisnis multinasional biasanya menghadapi pengawasan karena kerangka kerja operasional mereka yang rumit dan operasi internasional (Lenz 2020). Di Indonesia, di mana pungutan menyumbang lebih dari 85% dari seluruh pendapatan pemerintah pada tahun 2018, dan merupakan bagian yang sangat besar dari kekayaan negara, masalah ini menjadi sangat mendesak (Halimatussadiah et al. 2023). Terlepas dari kontribusi tersebut, perusahaan multinasional telah dikritik karena terlibat dalam pendekatan penghindaran pajak, mengeksploitasi kesenjangan dalam peraturan perpajakan

internasional, dan menggunakan teknik transfer pricing untuk memindahkan pendapatan ke wilayah dengan pajak rendah (Cooper dan Nguyen 2020). Perilaku-perilaku ini tidak hanya menghilangkan dana penting bagi pemerintah, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. (Christensen 2011; Christensen et al. 2022). Selain itu, pelaksanaan prosedur administrasi perusahaan (GCG) yang kuat dipandang sebagai pencegah penghindaran pajak, dengan menekankan transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan. Namun demikian, masih menjadi perdebatan, sejauh mana GCG dapat berdampak pada kepatuhan pajak ketika perusahaan multinasional terlibat dalam persiapan pajak secara aktif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa otonomi dewan perusahaan dapat mendorong penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham (Minnick dan Noga 2010) namun yang lain berpendapat bahwa keterbukaan yang lebih besar dapat mendorong perilaku pajak yang lebih bertanggung jawab (Kornhauser 1987).

Teori keagenan mendasari pemahaman tentang hubungan antara administrasi perusahaan dan penghindaran pajak. Dasar pemikirannya adalah bahwa ada ketidaksepakatan antara administrasi (agen) dan investor (prinsipal), di mana para eksekutif mungkin saja melakukan tindakan yang menguntungkan diri mereka sendiri namun tidak menguntungkan pemegang saham. (Grundeis 2008). Penghindaran pajak dapat diamati melalui lensa ini, karena manajemen dapat mengejar skema pajak yang berani untuk memaksimalkan keuntungan sementara, yang dapat membantu mereka melalui insentif berbasis kinerja secara keseluruhan, tetapi dengan mengorbankan reputasi perusahaan jangka panjang dan ketaatan terhadap peraturan. (Chien 2010). Prosedur administrasi perusahaan yang baik, seperti pemilihan administrator yang bebas dan pembentukan komite audit, dimaksudkan untuk mengimbangi masalah keagenan dengan mengkonfirmasi bahwa para eksekutif berperilaku demi kepentingan terbesar investor (Arnold dan de Lange 2004). Kurz (2023, Zhou dkk. (2024) berpendapat bahwa pemegang saham juga dapat mendorong penghindaran pajak ketika hal tersebut selaras dengan tujuan mereka, dengan mengusulkan

interaksi yang rumit di antara struktur administrasi dan strategi pajak.

Meskipun perusahaan multinasional memiliki sumber daya keuangan dan kemampuan beradaptasi operasional untuk menjalankan taktik perencanaan pajak yang rumit, penting juga untuk memeriksa bagaimana tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Temuan-temuan mengenai GCG dan penghindaran pajak masih samar-samar, menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut di bidang ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut. Sebuah penelitian empiris telah menunjukkan korelasi yang baik antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak (Minnick dan Noga 2010; Reed, Minnick, dan Dietrich 2018). Lin, Cheng, dan Zhang (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang mencari keterbukaan dan tanggung jawab akan menahan diri dari perencanaan pajak yang agresif. Penelitiannya menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang mendorong kepatuhan dan praktik bisnis yang etis berhubungan dengan berkurangnya kemungkinan penghindaran pajak. Lebih lanjut, penelitian Essen et al. Suprpto dan Agustia (2023) menegaskan bahwa GCG dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan dengan memungkinkan perusahaan-perusahaan di Eropa untuk melewati krisis keuangan dengan aman, sehingga menghindari perilaku pajak yang tidak bertanggung jawab karena protokol tata kelola yang kuat. Sebaliknya, beberapa akademisi berpendapat bahwa GCG dapat secara tidak sengaja memfasilitasi penghindaran pajak. Dapatkan narasi utama kami setiap dua bulan sekali Shang dkk. (2024) menunjukkan korelasi yang baik antara kecurangan pajak dan independensi dewan. Direktur independen diantisipasi untuk mengurangi konflik keagenan; namun, sebagai komponen dari kerangka kerja tata kelola yang hanya berfokus pada nilai pemegang saham, mereka dapat memberi saran tentang strategi pajak yang meningkatkan nilai pemegang saham, bahkan jika rencana tersebut mencakup praktik terlarang seperti penggelapan pajak. Mengevaluasi kepraktisan dalam menyelaraskan kepentingan manajer, pemegang saham, dan masyarakat melalui desain GCG tampaknya merupakan isu yang krusial, yang lebih dari sekadar keadilan pajak. Sikka dan Hampton (2005) Pernyataan yang diperdebatkan bahwa pemegang saham sering kali mendorong penghindaran pajak memperumit situasi: Bagaimana kita menafsirkan tata kelola yang baik ketika perusahaan yang dikelola dengan baik pun terpaksa menggunakan langkah-langkah pajak yang agresif untuk menguntungkan pemegang saham? Korelasi antara GCG dan penghindaran pajak di Indonesia belum cukup dipahami, terutama karena kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan oleh inisiatif-inisiatif seperti peningkatan rasio cakupan

pemeriksaan pajak. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemeriksaan pajak dilakukan lebih sering karena pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan sukarela di antara perusahaan-perusahaan, terutama di daerah-daerah yang secara tradisional memiliki tingkat partisipasi yang rendah, seperti perusahaan-perusahaan multinasional. Audit pajak di tingkat perusahaan dapat mengurangi kecurangan dan penghindaran pajak dengan meningkatkan risiko deteksi; namun, penelitian terbatas telah mengeksplorasi bagaimana audit ini didistribusikan di antara perusahaan multinasional terkait fungsinya pada berbagai tahap kontinum perilaku pajak GCG. Penelitian ini menambah khazanah dengan mengeksplorasi perspektif yang belum pernah diteliti, menyelidiki bagaimana rasio cakupan audit pajak dapat melemahkan hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan penghindaran pajak penghasilan, berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya (Sri Utaminingsih et al. 2022). Penelitian ini berpendapat bahwa peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan audit pajak dapat meningkatkan dampak pencegahan GCG terhadap ketidakpatuhan pajak. Hal ini sangat relevan untuk perusahaan multinasional di Indonesia, di mana interaksi skema pajak lintas batas dan peningkatan pengawasan audit menghadirkan kesulitan yang signifikan terhadap struktur tata kelola perusahaan.

Kerangka kebijakan pajak yang berkembang di Indonesia belum diteliti secara memadai, oleh karena itu, penelitian ini sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penting dalam literatur dan menawarkan perspektif baru dalam menguji hubungan antara GCG dan penggelapan pajak di berbagai tingkat pemeriksaan audit sebagai kontribusi yang sehat dengan memperlakukan persentase cakupan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi. Hal ini diharapkan memiliki implikasi yang signifikan bagi para pembuat undang-undang, birokrat, dan pemungut pajak di Indonesia karena mereka bergulat dengan tingkat kepatuhan yang rendah di Indonesia dan juga negara-negara berkembang lainnya. (McLeod 2005; Setiyono dan McLeod 2010). Penelitian ini juga merupakan bagian dari diskusi yang lebih luas tentang bagaimana tata kelola perusahaan harus berkontribusi pada nilai ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan dan beretika yang melibatkan etika perpajakan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi hubungan antara praktik GCG dan penghindaran pajak di kalangan perusahaan multinasional di Indonesia, secara khusus mempertimbangkan bagaimana efek moderasi dari rasio cakupan audit pajak mempengaruhi hubungan tersebut. Oleh karena itu, kami berhipotesis bahwa peningkatan rasio cakupan audit pajak menyebabkan peningkatan efek GCG dalam mengurangi

penghindaran pajak perusahaan dan lebih lanjut menyarankan panduan praktis untuk secara efektif merangsang pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi tata kelola apa yang dapat digunakan untuk mendorong praktik pajak yang lebih bertanggung jawab di kalangan MNC.

## 2. Tinjauan Kritis

Kerangka teori berfungsi sebagai dasar untuk memahami hubungan antar variabel dan memandu proses penelitian. Bagian ini akan menguraikan teori-teori utama yang relevan dengan penelitian ini, dengan fokus pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Penghindaran Pajak, dan dampak Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan dan efek jera.

### 2.1 Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau GCG, diperlukan untuk mengelola bisnis yang efektif dan transparan. Konsep GCG mencoba, sampai batas tertentu, memecahkan masalah prinsipal-agen yang hampir selalu menimbulkan konflik antara kepentingan manajemen dan pemangku kepentingan seperti pemegang saham (Tanjung 2020). GCG didukung oleh beberapa kerangka teori. Teori Keagenan, yang pertama kali (Jensen dan Meckling 2019) adalah teori yang mendasari Principal Agent Conflict (PAC) yang menjadi dasar GCG. Dalam konteks ini, biaya keagenan adalah konsep untuk merujuk pada masalah yang didasarkan pada konflik kepentingan antara prinsipal (atau pemegang saham) dan agen (atau manajer). Praktik GCG seperti komite audit dan anggota dewan independen dapat mengurangi biaya keagenan dan mengurangi konflik-konflik ini dengan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. Teori Pemangku Kepentingan memperluas Teori Keagenan dengan menekankan pentingnya mengenali setiap pihak yang terpengaruh oleh tindakan perusahaan. Freeman dan Phillips (2018) berpendapat bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada berbagai konstituen lainnya: karyawan, pelanggan, pemasok, dan anggota masyarakat. Teori pemangku kepentingan diintegrasikan ke dalam praktik GCG melalui keterbukaan dan kesetaraan, yang telah ditekankan oleh rekomendasi OECD dan KNKG dalam sistem tata

kelola perusahaan. Teori Institusional menunjukkan bahwa organisasi menyesuaikan diri dengan tekanan dan rutinitas institusional untuk mendapatkan legitimasi dan melanjutkan keberadaannya (DiMaggio dan Powell 2010). Praktik GCG biasanya mencerminkan norma dan standar institusional, yang berdampak pada perilaku perusahaan dan kerangka kerja tata kelola (Agus Wahyudin 2017). Biasanya, perusahaan mengadopsi prinsip-prinsip GCG sebagai tanggapan terhadap peraturan dan karena manfaat persepsi yang terkait.

### 2.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah perencanaan yang sesuai dengan isi dan semangat hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Terdapat sejumlah teori dan model yang dapat digunakan untuk memahami perilaku penghindaran pajak. Becker (2014) mengembangkan Teori Ekonomi Penghindaran Pajak, yang menyatakan bahwa individu dan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan syarat bahwa manfaat penghindaran pajak lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung, termasuk denda dan sanksi hukum. (Slemrod dan Yitzhaki, 2002). Alasan ini menjelaskan mengapa perusahaan menghabiskan begitu banyak waktu dan sumber daya untuk merancang strategi perencanaan pajak yang rumit untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. (Abdul Wahab dan Holland 2012). Implikasi dari teori keagenan untuk penghindaran pajak juga menjelaskan mengapa penghindaran pajak mungkin menarik bagi manajer, mereka mungkin memiliki insentif dan kesempatan untuk menghindari pajak dalam rangka memaksimalkan keuntungan jangka pendek dan bonus (Bauer, Kourouxous, dan Krenn 2018). Tetapi praktik-praktik tersebut bisa jadi tidak konsisten dengan pandangan jangka panjang pemegang saham, dan doktrin bisnis secara umum (Abdul Wahab dan Holland 2012).. Komite audit independen, sebuah mekanisme GCG, juga dapat mengawasi praktik penghindaran pajak agar tidak menjadi demonstratif. Lister dan Shick (2005) kemudian menguraikan orientasi kognitif dan keseimbangan antara penegakan hukum dan fasilitasi (Gambar 2), sebelum beralih ke tinjauan sebelumnya yang mengaitkan perilaku pajak dengan Teori Perilaku untuk melengkapinya pengantar mereka.

Salah satu teori baru yang sedang dicermati oleh para peneliti adalah budaya perusahaan, sikap manajemen, dan norma-norma organisasi dalam kaitannya dengan strategi penghindaran pajak. Aspek-aspek perilaku ini membantu memberikan penjelasan mengapa beberapa perusahaan lebih agresif dalam perencanaan pajak mereka.

### 2.3 Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak & Efek Jera

Berdasarkan kerangka teori di atas, bagian ini akan mengajukan hipotesis mengenai tata kelola perusahaan yang baik (GCG), penghindaran pajak, dan rasio cakupan pemeriksaan pajak. Setiap hipotesis dihubungkan dengan literatur yang relevan, sehingga terdapat alasan yang koheren mengapa penulis membuat hipotesis tersebut (yang tentunya akan menjadi dasar yang kuat untuk pengujian empiris).

Transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang beretika, seperti yang ditunjukkan oleh tata kelola perusahaan yang baik (GCG), juga dapat dipertimbangkan untuk secara signifikan mengurangi praktik penghindaran pajak. Mekanisme GCG seperti komisisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit, serta keberadaan audit eksternal, secara formal diharapkan memiliki efek langsung terhadap kecenderungan penghindaran pajak melalui pemantauan dan meningkatkan dampak negatif bagi perencanaan pajak yang agresif.

Penyusunan hipotesis ini berasal dari pendapat subjektif yang diungkapkan dalam Komite Nasional Indonesia untuk Tata Kelola Pemerintahan Trusmi (2008) GCG ditujukan untuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk kewajiban membayar pajak. Diharapkan mekanisme GCG yang efektif dapat meminimalkan penghindaran pajak dengan mendorong pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta praktik perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Claessens dan Yurtoglu pada tahun 2013 yang menemukan bahwa GCG yang diimplementasikan dengan baik dapat mengurangi perilaku pajak yang agresif. Mahrani dan Soewarno (2018) menyatakan bahwa mekanisme tata kelola yang kuat meningkatkan tingkat pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan, serta membawa asumsi tambahan bahwa perusahaan dengan standar GCG yang tepat akan mengurangi praktik penghindaran pajak.

Implikasi mendasar dalam teori GCG adalah bahwa tingkat efek negatif GCG yang tinggi memiliki penghindaran pajak yang lebih lemah. Kovermann dan Velte (2019) menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik mengurangi manajemen laba dan penghindaran pajak. Cheng dan Warfield (2005) memberikan bukti tambahan bahwa adalah mungkin untuk mengembangkan strategi pelaporan keuangan dan pajak dengan memasukkan insentif ekuitas, seperti struktur tata kelola.

Rasio cakupan pemeriksaan pajak: Rasio ini mengukur jumlah pemeriksaan pajak secara proporsional dengan jumlah total wajib pajak dan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dengan meminimalkan perilaku tidak patuh. Rasio cakupan pemeriksaan pajak yang lebih tinggi dapat meningkatkan deteksi dan penegakan hukum, yang pada gilirannya melengkapi praktik-praktik GCG dalam mengurangi penghindaran pajak.

Pembayar pajak yang dihadapkan pada tingkat penegakan hukum yang tinggi dikombinasikan dengan adanya celah hukum dapat menyebabkan individu melakukan penghindaran pajak secara legal (Slemrod dan Yitzhaki 2002). Pandangan ini menyiratkan bahwa campuran cakupan audit harus optimal untuk membatasi perencanaan pajak yang agresif (Kanagaretnam et al. 2018). Konsep yang mendasari hubungan positif antara GCG dan kepatuhan pajak, serta efek peredam terhadap perencanaan pajak yang agresif (Sartori 2009), menunjukkan bahwa efektivitas GCG dalam mengekang penghindaran pajak dapat diperkuat oleh cakupan audit.

Hipotesis ini dirumuskan dengan menguji apakah rasio cakupan audit pajak memoderasi pengaruh komponen GCG terhadap penghindaran pajak Tabel 1. Alm dan McClelland (2004) berargumen bahwa cakupan audit yang lebih besar meningkatkan kepatuhan karena hal tersebut meningkatkan tingkat deteksi yang diharapkan. Boubakri dan Cosset (1998) juga menekankan pentingnya kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan auditee ketika cakupan audit yang intens. Beasley, Pagach, dan Warr (2008) mendukung bahwa komite audit yang efektif dan audit eksternal mengurangi penghindaran pajak ketika didukung oleh cakupan audit yang berkualitas tinggi dalam kerangka Beasley.

*H1: Persentase komisisaris independen, kepemilikan institusional, efektivitas komite audit, dan audit eksternal secara bersama-sama berpengaruh*

signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.

H2: Persentase komisaris independen, kepemilikan institusional, efektivitas komite audit, dan audit eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.

H3: Rasio cakupan audit pajak memperkuat hubungan antara persentase komisaris independen dengan penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.

H4: Rasio cakupan audit pajak memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.

H5: Rasio cakupan audit pajak memperkuat hubungan antara efektivitas komite audit dan penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.

H6: Rasio cakupan audit pajak memperkuat hubungan antara audit eksternal dan penghindaran pajak di perusahaan multinasional.

### 3. Metodologi Inovasi

Kerangka kerja penelitian kuantitatif: analisis dan metodologi Model yang dicirikan oleh elemen-elemen deskriptif yang disertai dengan analisis statistik Analisis regresi termasuk faktor moderasi Ilustrasi Teoritis Data termasuk masing-masing dari keenam variabel dan Kontrol Pendidikan Ahli dan Keterampilan Keterampilan Komputer dan Kompetensi Penelitian Simulasi Model Penilaian Diskriminatif Gambar. Penelitian ini menginvestigasi dampak dari komponen-komponen tata kelola perusahaan yang baik (GCG) terhadap penghindaran pajak dan pengaruh moderasi dari rasio cakupan pemeriksaan pajak pada perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menekankan pada pemeriksaan data numerik dan pengujian hipotesis tentang penggelapan pajak melalui GCG, serta efek moderasi dari cakupan pemeriksaan pajak pada hubungan ini.

#### 3.1 Data dan Variabel

Tabel 1: Tabel ukuran penuh dengan statistik deskriptif untuk variabel latar belakang penelitian Variabel "Persentase Komisaris Independen" diukur dengan rasio komisaris independen terhadap jumlah total anggota dewan, yang mencerminkan tingkat pengawasan atas pengendalian internal. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dipegang oleh institusi keuangan (reksadana, bank investasi, dana pensiun, dll.), yang memberikan

mereka pengaruh signifikan terhadap pilihan-pilihan perusahaan dan tata kelola. Efektivitas Komite Audit [dinilai dari jumlah komite audit di dalam organisasi, yang mengindikasikan kerangka kerja pengawasan] Peringkat perusahaan audit bertindak sebagai pengganti "kualitas audit eksternal", di mana perusahaan yang lebih besar mendapatkan nilai yang lebih baik yang mengindikasikan kredibilitas yang tinggi yang sering dikaitkan dengan entitas besar. Penghindaran Pajak (DBTD) dapat dihitung sebagai laba sebelum pajak/keuntungan pajak tangguhan. Persentase ini akan memberikan gambaran mengenai pendekatan perencanaan pajak perusahaan. "Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak" mengukur frekuensi pemeriksaan pajak, terutama yang menunjukkan proporsi pengembalian pajak menurut undang-undang yang menjalani pemeriksaan yang memuaskan. Penelitian yang ada tentang karakteristik ini sebagai prediktor pengawasan perusahaan dan penghindaran pajak memberikan dasar untuk ukuran ini (Kanagaretnam et al. 2018).

Variabel utama yang digunakan, konsisten dengan penelitian empiris keuangan dan akuntansi sebelumnya mengenai tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Abdul Wahab dan Holland (2012) misalnya, menekankan pentingnya tata kelola yang kuat dalam mencegah tren penghindaran pajak aktif. Kovermann dan Velte (2019) juga menunjukkan bahwa cakupan pemeriksaan pajak telah terbukti memiliki dampak yang sangat kuat dalam mengurangi kemungkinan penghindaran pajak melalui peningkatan pencegahan.

#### 3.2 Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data

Berbicara mengenai Tabel 2, perlu diperhatikan bahwa kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini sangat penting untuk membuktikan validitas dan reliabilitas data. Pertama, Listing and Reporting menetapkan bahwa perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan Laporan Tahunan selama tahun 2019-2022, karena fakta ini memiliki dampak yang signifikan terhadap data analisis dari waktu ke waktu dari data Bursa Efek Indonesia dan pertumbuhan kinerjanya. Kedua, Penerapan GCG, memastikan bahwa perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam laporan tahunan, dengan kata lain integritas, transparansi, dan nilai

pasar saham. Ketiga, kelengkapan data, menuntut kelengkapan data yang relevan dan otentik perusahaan memperluas konsep Good Gisseling Governance, memiliki data ESG, EPS, dan harga saham yang relevan, dan memastikan ketersediaan data untuk analisis yang valid tanpa membiaskan hasil. INTEGER. Dengan demikian, berbagai kriteria ini sangat penting untuk memastikan relevansi, validitas, dan keandalan data dalam mendukung penelitian yang tepat.

Dari perusahaan-perusahaan tersebut dipilih 15 perusahaan yang paling besar di semua indikator versi, yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Sampel perusahaan multinasional ini memberikan pandangan dari berbagai sudut pandang di berbagai industri dan struktur tata kelola, karena mereka tunduk pada berbagai jenis lingkungan peraturan. Inklusi perusahaan dari berbagai sektor termasuk jasa keuangan, manufaktur yang terdiversifikasi, manufaktur barang konsumsi, perdagangan dan jasa, pertambangan dan manufaktur industri dasar membuat analisis ini lebih kaya dalam hal praktik-praktik organisasi dan mekanisme tata kelola. Hal ini didukung oleh Krishnan dan Zhang (2017) yang mengidentifikasi bahwa perusahaan multinasional menonjol dalam mengungkap hubungan antara arsitektur tata kelola dan penghindaran pajak karena mereka bertransaksi dalam berbagai lingkungan regulasi. Komposisi sampel kami dalam hal keragaman industri memungkinkan untuk mengeksplorasi bagaimana struktur kepemilikan negara mempengaruhi praktik penghindaran pajak di tingkat perusahaan dengan cara yang lebih rinci.

### 3.3 Analisis Data

Untuk analisis data penelitian ini, SPSS versi 1.5 akan digunakan untuk melakukan analisis regresi sederhana dan moderasi, untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian ini didukung atau tidak. Analisis regresi sederhana dengan dua ekor akan digunakan untuk menguji hubungan langsung antara komponen-komponen Good Corporate Governance (GCG), persentase komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan audit eksternal, dengan penghindaran pajak untuk Hipotesis H1 dan H2. Validasi hasil akan dilakukan dengan

melakukan uji statistik deskriptif, uji validitas, dan uji reliabilitas (Field, 2013).

Analisis regresi moderasi akan memungkinkan kita untuk menyelidiki efek moderasi dari rasio cakupan pemeriksaan pajak dalam hipotesis H3, H4, H5, dan H6. Penelitian ini akan menganalisis dampak dari rasio cakupan pemeriksaan pajak terhadap hubungan antara komponen GCG dan penghindaran pajak.

Persamaan untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 H1 > H2: & \dots\dots\dots = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_a \\
 H3: & \dots\dots\dots y = \alpha_2 + \beta_5 X_1 + \beta_6 M + \beta_7 X_1 \times M + e_b \\
 H4: & \dots\dots\dots y = \alpha_3 + \beta_8 X_2 + \beta_9 M + \beta_{10} X_2 \times M + e_c \\
 H5: & \dots\dots\dots y = \alpha_4 + \beta_{11} X_3 + \beta_{12} M + \beta_{13} X_3 \times M + e_d \\
 H6: & \dots\dots\dots y = \alpha_5 + \beta_{14} X_4 + \beta_{15} M + \beta_{16} X_4 \times M + e_e
 \end{aligned}$$

- Y = Penghindaran Pajak
- X1 = Persentase Komisaris Independen
- X2 = Kepemilikan Institusional
- X3 = Efektivitas Komite Audit
- X4 = Kualitas Audit Eksternal
- M = Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak
- $\alpha_{1-5}$  = Konstanta
- $\beta_{1-16}$  = Koefisien Regresi
- e = Kesalahan Standar

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Pengujian Deskriptif, Validitas, dan Reliabilitas

Proses pengujian dalam penelitian ini dimulai dengan analisis deskriptif yang memberikan gambaran mengenai karakteristik data yang digunakan. Pengujian deskriptif ini mencakup tabel yang menampilkan statistik dasar dari berbagai variabel yang terlibat, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar untuk setiap variabel.

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini. Variabel Persentase Komisaris Independen memiliki nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 0,83, dengan rata-rata sebesar 0,392 dan standar deviasi sebesar 0,15. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar data cenderung mengelompok di sekitar rata-rata dengan variasi yang relatif kecil. Untuk variabel Kepemilikan Saham Institusional, nilai minimum yang terukur adalah sebesar 0.23 dan nilai maksimum sebesar 0.99, dengan rata-rata 0.746 dan standar deviasi 0.214. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh pihak

institusional cukup bervariasi, namun secara rata-rata masih menunjukkan tren kepemilikan yang relatif tinggi. Variabel Komite Audit memiliki nilai minimum 3 dan maksimum 9, dengan rata-rata 3,383 dan standar deviasi 0,94. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit pada sampel ini bervariasi, namun rata-rata cenderung rendah dengan variasi yang cukup besar. Untuk variabel Audit Eksternal, nilai minimum yang diukur adalah 0 dan maksimum adalah 2, dengan rata-rata 1,8 dan standar deviasi 0,546. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar entitas memiliki tingkat audit eksternal yang lebih tinggi dengan variasi yang cukup signifikan. Terakhir, variabel Penghindaran Pajak (DBTD) menunjukkan nilai minimum -0,66 dan maksimum 0,21, dengan rata-rata -0,03 dan standar deviasi 0,122. Hal ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak bervariasi dalam sampel dengan rata-rata mendekati nol dan variasi yang relatif kecil.

Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Nilai alpha untuk Persentase Komisaris Independen adalah 0,844, menunjukkan reliabilitas yang sangat baik. Kepemilikan Saham Institusional memiliki nilai alpha sebesar 0,857, juga menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Komite Audit, dengan nilai alpha sebesar 0,814, dan Audit Eksternal, yang memperoleh alpha sebesar 0,756, keduanya berada dalam rentang reliabilitas yang dapat diterima. Penghindaran Pajak (DBTD) menunjukkan nilai alpha sebesar 0,859, menandakan reliabilitas yang sangat baik. Terakhir, Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak, dengan nilai alpha sebesar 0,734, juga menunjukkan konsistensi yang memadai. Semua nilai alpha di atas 0,7 menunjukkan bahwa instrumen pengukuran dalam penelitian ini adalah reliabel dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

### 3.2 Uji Analisis Regresi Linier Berganda & Analisis Regresi Moderating

Tabel 4 menunjukkan ringkasan model regresi untuk berbagai hipotesis yang diuji. Analisis regresi linearitas dari Hipotesis 1 & 2 dan nilai R sebesar 0,663,  $R^2 = 0,44$ , Adj.  $R^2 = 0,399$ , Std.Err dari  $b = 0,09433$ . Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 44% dari dependen dapat dijelaskan oleh model dan memiliki tingkat kesalahan prediksi yang rendah. 3 Hipotesis 3  $R^2 (.329)$   $R (.573)$  Adjusted (0.293) Error (0.10237) Model ini juga dapat menjelaskan 32.9% variasi, dengan kesalahan prediksi yang lebih besar dibandingkan dengan hipotesis 1 dan 2. Selanjutnya, Hipotesis 4 memiliki nilai R ( $R = .156$ ) dan nilai  $R^2$  ( $R^2 = .024$ ) dengan nilai adjusted  $R^2$  negatif (-.028), yang tidak signifikan pada tingkat  $p < 0,01$  berdasarkan koefisien dari Tabel E-32, dan standar error adalah (0.12342). Model ini memiliki  $R^2$  yang rendah

(0,024) dan kesalahan prediksi yang tinggi. Salah satu indikasi penting yang perlu diperhatikan adalah untuk hipotesis 5, memiliki nilai R sebesar 0,6 dan  $R^2$  sebesar 0,36,  $R^2$  yang disesuaikan sebesar 0,326, dan kesalahan standar sebesar 0,09994. Hasilnya, model ini mengungguli hipotesis 3 dan 4 dengan varians yang lebih tinggi yang dijelaskan oleh variabel independen, yaitu sebesar 36%, ditambah dengan kesalahan prediksi yang lebih rendah. Dalam hal ini, hipotesis 6 memiliki R sebesar 0,313 dan  $R^2$  0,098 (adjusted  $R^2 = 0,05$ ); kesalahan standarnya adalah 0,11866. Model ini hanya menjelaskan 9,867474% dari variasi variabel dependen dan tampaknya memiliki kesalahan prediksi yang tinggi.

Tabel 7: Hasil analisis regresi linier berganda untuk Hipotesis 1 dan 2 Pada model ini, konstanta memiliki koefisien sebesar -0,305 dengan standar error sebesar 0,061 dan nilai t hitung sebesar -5,032 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang mengindikasikan bahwa secara statistik signifikan. Variabel komisaris independen memiliki koefisien sebesar 0,287, dan standar error sebesar 0,086 persen dengan persentase sebesar 0,086 persen dengan persentase. Sedangkan nilai t-value menunjukkan pengaruh variabel ini terhadap variabel dependen, dan memiliki nilai  $T = 3,339$  dengan  $P < 0,001$ , yang berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan di dalamnya untuk mempengaruhi variabel dependen.  $y_1$  Disisi lain, variabel komite audit memiliki koefisien 0,002 dengan standar error 0,014 dan nilai t hitung 0,136, dan signifikansi dalam hal ini adalah 0. Audit eksternal 0,146 (standar opsi = 0,036, nilai t = 4,067, dan nilai signifikan 0,00) Memiliki pengaruh positif berkelanjutan terhadap variabel dependen Koefisien untuk kepemilikan institusional saham adalah -0,142, dengan standar error 0,094 dan nilai t sebesar (-1,515)/ $p = 0,135$  (juga tidak signifikan dalam model ini). ( $j=3$ )  $p = 0,135$ .

Tabel 8 menyajikan hasil analisis regresi moderasi untuk Hipotesis 3. Koefisien konstanta sebesar -0,653 dengan standar error 0,156 dan t-value -4,199 dengan tingkat signifikansi 0,000 (berarti signifikan). Variabel persentase komisaris independen memiliki koefisien 1,495, standar error 0,373, t-value 4,011, dan signifikansi 0,000, yang berarti terdapat pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen (y). Cakupan pemeriksaan pajak memiliki koefisien sebesar 22,369 dengan standar error 7,08, nilai t-value 3,16, dan nilai signifikansi 0,003 yang juga membuktikan adanya pengaruh positif yang signifikan. Tabel 5: Untuk hubungan antara ketergantungan pemeriksaan pajak dengan % komisaris independen Seperti yang terlihat pada tabel, variabel interaksi antara % komisaris independen dengan ketergantungan pemeriksaan pajak memiliki koefisien sebesar -52,272 dengan standar error 16,796 dan nilai t hitung -3,112 dengan nilai signifikansi 0,003.

Berdasarkan Tabel 9, hasil analisis regresi moderasi untuk Hipotesis 4 disajikan. Koefisien konstanta sebesar -0,302 dengan standar error sebesar 0,397 menghasilkan nilai t sebesar -0,761 dan nilai signifikansi sebesar 0,45 yang berarti secara statistik tidak signifikan. Selanjutnya, komite audit juga memberikan hasil yang tidak signifikan karena koefisiennya sebesar 0,071 dengan standar error 0,12 dan nilai t sebesar 0,547 serta nilai signifikansi sebesar 0,589. Demikian juga dengan koefisien untuk rasio cakupan pemeriksaan pajak sebesar 11,196 dengan standar error sebesar 20,195 dan nilai t sebesar 0,494 dengan nilai signifikansi sebesar 0,581 yang berarti juga tidak signifikan. Terakhir, koefisien untuk interaksi variabel dependen dan independen adalah -2,856, dengan standar error sebesar 6,161, nilai t sebesar -0,464, dan nilai signifikansi sebesar 0,645. Oleh karena itu, rasio cakupan pemeriksaan pajak bukan merupakan pemoderasi yang signifikan terhadap pengaruh komite audit pada penghindaran pajak, sehingga hipotesis nol tidak ditolak.

Hasil Analisis Regresi Moderasi untuk Hipotesis 5 disajikan pada Tabel 10. Koefisien pada konstanta adalah 0,689 dengan standar error 0,175, menghasilkan nilai t-value sebesar 3,933 (signifikan pada  $p = 0,000$ ). Hal ini berarti bahwa fitur konstanta relevan dalam model kami. Untuk variabel audit eksternal, koefisien memiliki nilai t-value sebesar 3,716 (signifikan pada  $p < 0,000$ ) dan standar error sebesar 0,093. Jadi, variabel eksternal audit mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Rasio cakupan pemeriksaan pajak: Rasio cakupan pemeriksaan pajak memiliki koefisien sebesar 22,147% dengan standar error sebesar 8,415, nilai t sebesar 2,632, dan nilai signifikan sebesar 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa rasio cakupan pemeriksaan pajak juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertama, kami melihat bahwa interaksi antara audit eksternal dan rasio cakupan pemeriksaan pajak memiliki koefisien sebesar -11,336 dengan standar error sebesar 4,477, sehingga dengan nilai t sebesar -2,532 signifikan pada tingkat  $p = 0,014$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh rasio cakupan audit pajak memiliki peran mediasi dalam memoderasi hubungan antara audit eksternal dengan penghindaran pajak dengan koefisien yang negatif, maka hipotesis 5 didukung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah auditor eksternal, maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin rendah.

Tabel 9 menyajikan hasil analisis regresi moderasi untuk Hipotesis 6. Dari tabel tersebut terlihat bahwa koefisien untuk variabel konstanta sebesar -0,366 dengan standar error sebesar 0,217, nilai t sebesar -1,690, dan nilai signifikansi sebesar 0,097. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa konstanta

dalam model ini tidak signifikan. Kepemilikan Saham Institusional memiliki koefisien sebesar 0,403 dengan standar error sebesar 0,282, nilai t sebesar 1,429, dan nilai signifikansi sebesar 0,159. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel ini juga tidak signifikan dalam model. Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak menunjukkan nilai koefisien sebesar 11,01 dengan standar error sebesar 10,68, nilai t sebesar 1,031, dan nilai signifikansi sebesar 0,307. Nilai signifikansi yang melebihi 0,05 menunjukkan bahwa rasio cakupan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Terakhir, variabel interaksi  $X \times \text{Moderasi}$  memiliki koefisien sebesar -12,427 dengan standar error sebesar 13,963, nilai t sebesar -0,890, dan nilai signifikansi sebesar 0,377. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel interaksi juga tidak signifikan, mengindikasikan bahwa moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap model. Secara keseluruhan, hasil analisis regresi moderasi untuk Hipotesis 6 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak dalam analisis ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh beberapa variabel terhadap penghindaran pajak, dengan peran moderasi rasio cakupan pemeriksaan pajak. Hasil regresi linier berganda dan regresi moderasi telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dengan penghindaran pajak.

Pengaruh positif dan signifikan dari persentase komisaris independen terhadap penghindaran pajak ( $\beta = 0,287$ ,  $p = 0,001$ ) ditunjukkan pada Tabel 5. Hasil ini konsisten dengan hipotesis bahwa komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi laporan keuangan, yang berakibat pada penurunan penghindaran pajak (Klein 2002). Hal ini akan mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan kepemilikan saham institusional tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini sebagian dapat dijelaskan oleh fakta bahwa komite audit tidak melakukan kesalahan dan kepemilikan institusional tidak dapat bertindak sebagai penjaga gerbang pajak yang efektif (Krishnan, 2005). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak bergantung pada beberapa faktor kontekstual, termasuk ukuran

komite dan keanggotaan (Hoseini, Safari Gerayli, dan Valiyan, 2019).

Audit eksternal secara positif mempengaruhi penghindaran pajak ( $b = 0.146$ ,  $p = 0.000$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa audit eksternal yang kuat membantu meningkatkan pengawasan dan menghambat penghindaran pajak melalui kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, seperti yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya (DeFond & Francis, 2005). Kualitas dan independensi yang tinggi dari auditor eksternal seharusnya dapat mencegah upaya manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak juga berfungsi sebagai variabel moderasi (untuk Hipotesis 3 dan 4). Hasil dari proses analisis untuk Hipotesis 3 dapat dilihat dalam bentuk Tabel 6, dimana diketahui bahwa terdapat pengaruh antara Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak dengan Penghindaran Pajak, dimana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003. Sedangkan interaksi variabel Tax Audit Coverage Ratio dengan variabel lain yaitu persentase komisaris independen memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap return ( $\beta = 52,272$ ,  $p$  value 0,003). Hal ini mengimplikasikan bahwa peningkatan cakupan pemeriksaan pajak dapat memperkuat dampak variabel seperti komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Sebaliknya, hasil untuk Hipotesis 4 (Tabel 7) mengungkapkan bahwa Rasio Cakupan Audit Pajak tidak memoderasi Komite Audit dengan penghindaran pajak. Penjelasan untuk hal ini tampaknya karena komite audit tidak secara jelas memberikan nilai pada cakupan audit pajak dalam kasus ini atau ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi hasil audit pajak (Engel, Hayes, dan Wang, 2010).

Implikasi Kebijakan: Temuan-temuan dari penelitian ini akan menjadi instrumen bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pajak untuk membentuk peraturan dan kebijakan yang efisien untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak. Sebagai contoh, memberdayakan kantor komisaris independen dan memperluas cakupan audit pajak adalah beberapa strategi untuk mengurangi penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan diharapkan memiliki audit eksternal yang berkualitas tinggi sebagai cara untuk mengurangi risiko penghindaran pajak (Gaaya, Lakhali, dan Lakhali, 2019).

Kontribusi Teoritis: Penelitian ini mengintegrasikan teori keagenan dengan teori audit

untuk menjelaskan penghindaran pajak jangka panjang. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pengawasan yang ketat oleh komisaris yang terpisah dan audit eksternal memang dapat mencegah penghindaran pajak sampai batas tertentu. Kedua, temuan ini menunjukkan bahwa intimidasi pemeriksaan pajak dapat memoderasi hubungan antara variabel pengawasan dan penghindaran pajak, yang konsisten dengan teori moderasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Jumlah sampel yang kecil yaitu 60 perusahaan juga dapat membatasi generalisasi dari hasil penelitian ini. Keterbatasan kedua adalah bahwa penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dan tidak membahas faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi penghindaran pajak (Lanis dan Richardson 2011; Richardson 2006; Taylor dan Richardson 2012).

## 5. Simpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa Persentase Komisaris Independen dan Audit Eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Saham tidak signifikan. Rasio Cakupan Audit Pajak berperan sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara variabel-variabel tertentu dengan penghindaran pajak. Temuan ini memberikan kontribusi penting pada literatur mengenai penghindaran pajak dan memberikan arahan praktis untuk kebijakan dan praktik perpajakan.

## Pernyataan pendanaan

Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan mana pun di sektor publik, komersial, atau nirlaba.

## Kontribusi penulis

Wulan Setyaningsih mengonsep penelitian, Tiara Dwi Syamsiah melakukan analisis, dan bertanggung jawab atas penulisan naskah. Wulan Setyaningsih dan Tiara Dwi Syamsiah; Semua aspek penelitian, termasuk pengumpulan dan interpretasi data, dilakukan sendiri oleh penulis

## Konflik Kepentingan



Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi makalah ini.

**Pernyataan Ketersediaan Data**

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia dari penulis yang bersangkutan atas permintaan yang wajar.

**Ucapan Terima Kasih**

**Data Gambar dan Tabel**

**A. Tabel Lampiran Data**

Tabel 1. Variabel Data dan Pengukuran

Variabel	Deskripsi	Pengukuran/Formula
Persentase Komisaris Independen	Rasio komisaris independen terhadap total komisaris di dewan	Percentage $= \frac{\text{Number of Independent Commissioners}}{\text{Total Number of Commissioners}}$
Kepemilikan Institusional	Proporsi saham yang dimiliki oleh investor institusional terhadap total saham yang diterbitkan	Institutional Ownership $= \frac{\text{Shares Owned by Institutions}}{\text{Total Issued Shares}}$
Efektivitas Komite Audit	Jumlah komite audit di dalam perusahaan	Jumlah Komite Audit
Kualitas Audit Eksternal	Kualitas audit eksternal yang dinilai oleh perusahaan audit	2 untuk Empat Besar, 1 untuk Sepuluh Besar, 0 untuk yang lainnya
Penghindaran Pajak (DBTD)	Pengukuran penghindaran pajak dengan menggunakan rasio Manfaat Pajak Tangguhan terhadap Laba Sebelum Pajak	Tax Avoidance = $\frac{\text{EBIT} - \text{Earnings After Tax}}{\text{Earnings After Tax}}$
Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak	Rasio pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap jumlah wajib lapor pajak (SPT)	Tax Audit Coverage Ratio $= \frac{\text{Number of Audits Conducted}}{\text{Number of Mandatory SPTs}}$

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	Deskripsi
1. Pencatatan dan Pelaporan	Perusahaan harus terdaftar di BEI dari tahun 2019 hingga 2022 dan telah menerbitkan laporan tahunan untuk tahun-tahun tersebut.
2. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Perusahaan harus menyatakan kepatuhan mereka terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam laporan tahunan mereka.
3. Kelengkapan Data	Perusahaan harus memberikan informasi yang lengkap terkait dengan variabel pengukuran penelitian.

Sumber Data Riset; Observasi diolah Peneliti 2024



Tabel 3. Perusahaan Sampel Berdasarkan Sektor

Sektor	Jumlah Perusahaan
Jasa Keuangan	4
Manufaktur yang terdiversifikasi	3
Manufaktur Barang Konsumsi	3
Jasa Perdagangan	2
Pertambangan	2
Manufaktur Industri Dasar	1

Sumber Data Riset; Observasi diolah Peneliti 2024

Tabel 4: Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Deviasi Standar
Persentase Komisaris Independen	60	0	0,83	0,392	0,15
Kepemilikan Institusional Saham	60	0,23	0,99	0,746	0,214
Komite Audit	60	3	9	3,383	0,94
Audit Eksternal	60	0	2	1,8	0,546
Penghindaran Pajak (DBTD)	60	-0,66	0,21	-0,03	0,122

Sumber Data Riset; Observasi diolah Peneliti 2024

Tabel 5: Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Status
Persentase Komisaris Independen	0,844	Reliabel
Kepemilikan Institusional Saham	0,857	Reliabel
Komite Audit	0,814	Reliabel
Audit Eksternal	0,756	Reliabel
Penghindaran Pajak (DBTD)	0,859	Reliabel
Rasio Cakupan Audit Pajak	0,734	Reliabel

Sumber Data Riset; Observasi diolah Peneliti 2024

Tabel 6: Ringkasan Model Regresi

Hipotesis	R	R Square	R Square yang Disesuaikan	Std. Error of the Estimate
1&2	0,663	0,44	0,399	0,09433
3	0,573	0,329	0,293	0,10237
4	0,156	0,024	-0,028	0,12342
5	0,6	0,36	0,326	0,09994
6	0,313	0,098	0,05	0,11866

Sumber Data Riset; Observasi diolah Peneliti 2024

Tabel 7: Hasil Regresi Linier Berganda untuk Hipotesis 1 & 2

Variabel	$\beta$	Std. Kesalahan	Beta	t	Sig.
(Konstanta)	-0,305	0,061		-5,032	0
% Komisaris Independen	0,287	0,086		3,339	0,001

Variabel	$\beta$	Std. Kesalahan	Beta	t	Sig.
Komite Audit	0,002	0,014		0,136	0,891
Audit Eksternal	0,146	0,036		4,067	0
Kepemilikan Institusional Saham	-0,142	0,094	-0,251	-1,515	0,135

Sumber Data Riset; Observasi diolah Peneliti 2024

Tabel 8: Hasil Analisis Regresi Moderasi untuk Hipotesis 3

Variabel	$\beta$	Std. Kesalahan	Beta	t	Sig.
(Konstanta)	-0,653	0,156		-4,199	0
% Komisaris Independen	1,495	0,373	1,845	4,011	0
Rasio Cakupan Audit Pajak	22,369	7,08	0,986	3,16	0,003
X*Moderasi	-52,272	16,796	-1,697	-3,112	0,003

Sumber Data Riset; Observasi diolah Peneliti 2024

Tabel 9: Hasil Analisis Regresi Moderasi untuk Hipotesis 4

Variabel	$\beta$	Std. Kesalahan	Beta	t	Sig.
(Konstanta)	-0,302	0,397		-0,761	0,45
Komite Audit	0,071	0,12	0,547	0,589	0,558
Rasio Cakupan Audit Pajak	11,196	20,195	0,494	0,554	0,581
X*Moderasi	-2,856	6,161	-0,572	-0,464	0,645

Sumber Data Riset; Observasi diolah Peneliti 2024

Tabel 10: Hasil Analisis Regresi Moderasi untuk Hipotesis 5

Variabel	$\beta$	Std. Kesalahan	Beta	t	Sig.
(Konstanta)	-0,689	0,175		-3,933	0
Audit Eksternal	0,346	0,093	1,554	3,716	0
Rasio Cakupan Audit Pajak	22,147	8,415	0,976	2,632	0,011
X*Moderasi	-11,336	4,477	-1,389	-2,532	0,014

Sumber Data Riset; Observasi diolah Peneliti 2024

Tabel 11: Hasil Analisis Regresi Moderasi untuk Hipotesis 6

Variabel	$\beta$	Std. Kesalahan	Beta	t	Sig.
(Konstanta)	-0,366	0,217		-1,69	0,097
Kepemilikan Institusional Saham	0,403	0,282	0,709	1,429	0,159
Rasio Cakupan Audit Pajak	11,01	10,68	0,485	1,031	0,307
X*Moderasi	-12,427	13,963	-0,593	-0,89	0,377

Sumber Data Riset; Observasi diolah Peneliti 2024

## Referensi

- Abdul Wahab, Nor Shaipah, and Kevin Holland. 2012. "Tax Planning, Corporate Governance and Equity Value." *The British Accounting Review* 44(2):111-24. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.005>.
- Agus Wahyudin, Badingatus Solikhah. 2017. "Corporate Governance Implementation Rating in Indonesia and Its Effects on Financial Performance." *Corporate Governance*.
- Arnold, Beth, and Paul de Lange. 2004. "Enron: An Examination of Agency Problems." *Critical Perspectives on*

- Accounting* 15(6):751–65. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2003.08.005>.
- Bauer, Thomas, Thomas Kourouxous, and Peter Krenn. 2018. "Taxation and Agency Conflicts between Firm Owners and Managers: A Review." *Business Research* 11(1):33–76. doi: 10.1007/s40685-017-0054-y.
- Beasley, Mark, Don Pagach, and Richard Warr. 2008. "Information Conveyed in Hiring Announcements of Senior Executives Overseeing Enterprise-Wide Risk Management Processes." *Journal of Accounting, Auditing and Finance* 23(3):311–32. doi: 10.1177/0148558X0802300303.
- Becker, Sebastian D. 2014. "When Organisations Deinstitutionalise Control Practices: A Multiple-Case Study of Budget Abandonment." *European Accounting Review* 23(4):593–623. doi: 10.1080/09638180.2014.899918.
- Chien, Shih-Shen. 2010. "Economic Freedom and Political Control in Post-Mao China: A Perspective of Upward Accountability and Asymmetric Decentralization." *Asian Journal of Political Science* 18(1):69–89. doi: 10.1080/02185371003669379.
- Christensen, John. 2011. "The Looting Continues: Tax Havens and Corruption" edited by E. Brown and J. Cloke. *Critical Perspectives on International Business* 7(2):177–96. doi: 10.1108/17422041111128249.
- Christensen, Theodore E., Adrianna Huffman, Melissa F. Lewis-Western, and Rachel Scott. 2022. "Accruals Earnings Management Proxies: Prudent Business Decisions or Earnings Manipulation?" *Journal of Business Finance & Accounting* 49(3–4):536–87. doi: <https://doi.org/10.1111/jbfa.12585>.
- Cooper, Maggie, and Quyen T. K. Nguyen. 2020. "Multinational Enterprises and Corporate Tax Planning: A Review of Literature and Suggestions for a Future Research Agenda." *International Business Review* 29(3):101692. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692>.
- DiMaggio, Paul, and Walter W. Powell. 2010. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields (Translated by G. Yudin)." *Journal of Economic Sociology* 11(1):34–56. doi: 10.17323/1726-3247-2010-1-34-56.
- Elbra, Ainsley, and John Mikler. 2017. "Paying a 'Fair Share': Multinational Corporations' Perspectives on Taxation." *Global Policy* 8(2):181–90. doi: <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12379>.
- Engel, Ellen, Rachel M. Hayes, and Xue Wang. 2010. "Audit Committee Compensation and the Demand for Monitoring of the Financial Reporting Process." *Journal of Accounting and Economics* 49(1):136–54. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.08.001>.
- Fox, Michaela, Mike Mitchell, Moira Dean, Christopher Elliott, and Katrina Campbell. 2018. "The Seafood Supply Chain from a Fraudulent Perspective." *Food Security* 10(4):939–63. doi: 10.1007/s12571-018-0826-z.
- Freeman, R. Edward, and Robert Phillips. 2018. "Tensions in Stakeholder Theory." 1–19. doi: 10.1177/0007650318773750.
- Gaaya, Safa, Nadia Lakhali, and Faten Lakhali. 2019. "Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance? The Moderating Effect of Audit Quality." *Managerial Auditing Journal* 32(7):731–44. doi: 10.1108/MAJ-02-2017-1530.
- Grunde, Jens. 2008. "Are Managers Agents or Stewards of Their Principals?" *Journal Für Betriebswirtschaft* 58(3):141–66. doi: 10.1007/s11301-008-0038-2.
- Halimatussadiyah, Alin, Satoshi Yamazaki, Rachel Nichols, Umi Muawanah, Fachry Abdul Razak Afifi, and Muhammad Adriansyah. 2023. "Co-Management of Large-Scale and Medium-Scale Fisheries: An Assessment of the Fishery Tax System in Indonesia." *Marine Policy* 148:105458. doi: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105458>.

- Hoseini, Mohammadreza, Mehdi Safari Gerayli, and Hasan Valiyan. 2019. "Demographic Characteristics of the Board of Directors' Structure and Tax Avoidance." *International Journal of Social Economics* 46(2):199–212. doi: 10.1108/IJSE-11-2017-0507.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 2019. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership* 77–132. doi: 10.4159/9780674274051-006.
- Kanagaretnam, Kiridaran, Jimmy Lee, Chee Yeow Lim, and Gerald Lobo. 2018. "Societal Trust and Corporate Tax Avoidance." *Review of Accounting Studies* 23(4):1588–1628. doi: 10.1007/s11142-018-9466-y.
- Kornhauser, Marjorie E. 1987. "The Rhetoric of the Anti-Progressive Income Tax Movement: A Typical Male Reaction." *Michigan Law Review* 86(3):465–523. doi: 10.2307/1289284.
- Kovermann, Jost, and Patrick Velte. 2019. "The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 36:100270. doi: <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>.
- Kuo, Nan-Ting, and Cheng-Few Lee. 2016. "A Potential Benefit of Increasing Book–Tax Conformity: Evidence from the Reduction in Audit Fees." *Review of Accounting Studies* 21(4):1287–1326. doi: 10.1007/s11142-016-9367-x.
- Kurz, Rudi. 2023. "Rebound Effects of Eco-Efficiency BT - Encyclopedia of Sustainable Management." Pp. 2733–38 in, edited by S. O. Idowu, R. Schmidpeter, N. Capaldi, L. Zu, M. Del Baldo, and R. Abreu. Cham: Springer International Publishing.
- Lanis, Roman, and Grant Richardson. 2011. "The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness." *Journal of Accounting and Public Policy* 30(1):50–70. doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003.
- Lenz, Hansrudi. 2020. "Aggressive Tax Avoidance by Managers of Multinational Companies as a Violation of Their Moral Duty to Obey the Law: A Kantian Rationale." *Journal of Business Ethics* 165(4):681–97. doi: 10.1007/s10551-018-4087-8.
- Lin, Kenny Z., Suwina Cheng, and Fang Zhang. 2017. "Corporate Social Responsibility, Institutional Environments, and Tax Avoidance: Evidence from a Subnational Comparison in China." *The International Journal of Accounting* 52(4):303–18. doi: <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.11.002>.
- Mahrani, Mayang, and Noorlailie Soewarno. 2018. "The Effect of Good Corporate Governance Mechanism and Corporate Social Responsibility on Financial Performance with Earnings Management as Mediating Variable." *Asian Journal of Accounting Research* 3(1):41–60. doi: 10.1108/AJAR-06-2018-0008.
- Mcleod, Ross H. 2005. "The Struggle to Regain Effective Government under Democracy in Indonesia\*." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41(3):367–86. doi: 10.1080/00074910500117289.
- Minnick, Kristina, and Tracy Noga. 2010. "Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?" *Journal of Corporate Finance* 16(5):703–18. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>.
- Minnis, Michael, and Nemit Shroff. 2017. "Why Regulate Private Firm Disclosure and Auditing?" *Accounting and Business Research* 47(5):473–502. doi: 10.1080/00014788.2017.1303962.
- Ng, Jefferson, and Yudha Kurniawan. 2022. "The Parliament and Cooperative Oversight of the Indonesian Armed Forces: Why Civil–Military Relations in Indonesia Is Stable but Still in Transition." *Armed Forces & Society* 50(3):683–709. doi: 10.1177/0095327X221137281.
- Reed, Clintá Ché, Ann F. Minnick, and Mary S. Dietrich. 2018. "Nurses' Responses to Interruptions during

- Medication Tasks: A Time and Motion Study." *International Journal of Nursing Studies* 82:113-20. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.03.017>.
- Richardson, Grant. 2006. "Determinants of Tax Evasion: A Cross-Country Investigation." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 15(2):150-69. doi: <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2006.08.005>.
- Setiyono, Budi, and Ross H. McLeod. 2010. "Civil Society Organisations' Contribution to the Anti-Corruption Movement in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 46(3):347-70. doi: 10.1080/00074918.2010.522504.
- Shang, Shang, Zhongjiang Yao, Yepeng Yao, Liya Su, Zijing Fan, Xiaodan Zhang, and Zhengwei Jiang. 2024. "IntentObfuscator: A Jailbreaking Method via Confusing LLM with Prompts BT - Computer Security - ESORICS 2024." Pp. 146-65 in, edited by J. Garcia-Alfaro, R. Kozik, M. Choraś, and S. Katsikas. Cham: Springer Nature Switzerland.
- Sikka, Prem, and Mark P. Hampton. 2005. "The Role of Accountancy Firms in Tax Avoidance: Some Evidence and Issues." *Accounting Forum* 29(3):325-43. doi: <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2005.03.008>.
- Slemrod, Joel, and Shlomo Yitzhaki. 2002. "Chapter 22 - Tax Avoidance, Evasion, and Administration\*\*We Are Grateful to Wojciech Kopczuk for Valuable Research Assistance. Helpful Comments on an Earlier Draft Were Received from Jim Alm, Alan Auerbach, Len Burman, Brian Erard, Martin Feldstein, Firouz Gahvari, Roger Gordon, Jim Hines, Jonathan Kesselman, Louis Kaplow, Jim Poterba, Agnar Sandmo, Dan Shaviro, Eric Toder, Gideon Yaniv, the Participants at the NYU Law School Colloquium on Tax Policy and Public Finance and the Handbook Conference Held at the University of California at Berkeley." Pp. 1423-70 in Vol. 3, edited by A. J. Auerbach and M. B. T.-H. of P. E. Feldstein. Elsevier.
- Sri Utaminingsih, Nanik, Dini Kurniasih, Maylia Pramono Sari, and Monica Rahardian Ary Helmina. 2022. "The Role of Internal Control in the Relationship of Board Gender Diversity, Audit Committee, and Independent Commissioner on Tax Aggressiveness." *Cogent Business & Management* 9(1):2122333. doi: 10.1080/23311975.2022.2122333.
- Suprpto, Fitria Magdalena, and Dian Agustia. 2023. "The Analysis of Fraudulent Financial Statements Prevention Using Hexagon's Fraud and Government Internal Auditor as Moderating Variable in Local Government in Indonesia." *Forum for Development Studies* 50(3):513-37. doi: 10.1080/08039410.2023.2232365.
- Tanjung, Miranda. 2020. "A Cross-Firm Analysis of Corporate Governance Compliance and Performance in Indonesia." *Managerial Auditing Journal* 35(5):621-43. doi: 10.1108/MAJ-06-2019-2328.
- Taylor, Grantley, and Grant Richardson. 2012. "International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms." *International Journal of Accounting* 47(4):469-96. doi: 10.1016/j.intacc.2012.10.004.
- Trusko, Brett. 2008. "The Use of Six Sigma in Operational Risk and Regulatory Compliance: Reduction in Variability." Pp. 199-212 in *Governance, Risk, and Compliance Handbook*.
- Zhou, Zhongsheng, Zhuo Li, Shanzhong Du, and June Cao. 2024. "Robot Adoption and Enterprise R&D Manipulation: Evidence from China." *Technological Forecasting and Social Change* 200:123134. doi: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123134>.